



RENSTRA



TAHUN 2018 - 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BONE



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan perdagangan selama periode 2018-2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bone ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaksud pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone.

Rencana Strategis ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut. Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan setiap pada akhir tahun anggaran.

Demikian Rencana Strategis ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor perdagangan Kabupaten Bone.

Watampone, Februari 2019

Pt. KEPALA BPBD KAB. BONE

H. A. SURYA DARMA, SE. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. 19600424 198702 1 004



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan	7
1.4.Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ...	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	51
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	51
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	54
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	57
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS.....	59
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	68
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	69
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	69
4.2. Sasaran Jangka Menengan Perangkat Daerah	69
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	71
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	73
BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN.....	82
BAB VIII PENUTUP.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Didalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah/bawah-atas. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistic-tematik, integrative, dan spasial.

Dalam pasal 11 ayat (3) huruf a Permendagri 86 Tahun 2017 Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam penyusunan renstra, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 24 Januari 2007 menyampaikan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengurangi resiko bencana. Selanjutnya, pada tanggal 26 April 2007 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kedua perangkat hukum tersebut di atas merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi resiko bencana dan membangun masyarakat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. Selain itu, keduanya juga merupakan landasan hukum terbentuknya lembaga penanggulangan bencana baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada tanggal 04 Nopember 2010 telah mensahkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, dimana PERDA ini merupakan dasar hukum terbentuknya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone yang akan menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bone.

Permasalahan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Bone semakin kompleks pada era reformasi dan pengaruh global saat ini. Sejalan dengan itu, pelaksanaan otonomi daerah dan tuntutan reformasi serta terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta PERDA Nomor 04 Tahun 2010 mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk menata landasan dan kebijakan serta program-program penanggulangan bencana di daerah ini. Dalam penataan ini, maka perangkat-perangkat hukum tersebut diatas menjadi acuannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan penanggulangan bencana yang menganut prinsip-prinsip cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabel, kemitraan, pemberdayaan dan nondiskriminatif yang memuat rencana penanggulangan ancaman Kebakaran, banjir, angin kencang (puting beliung) dan tanah longsor baik pada saat bencana, maupun pada tahap pasca bencana dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bone.

Proses/tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi tahap persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah, penyusunan rancangan renstra perangkat daerah, forum perangkat daerah, verifikasi rancangan renstra perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah, dan penetapan renstra perangkat daerah.

Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan

dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan di Kab/Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;

33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten Bone;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012-2032;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak;
43. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengurustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
44. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
45. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Bone;
46. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Dana Sosial Perusahaan
47. Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Badan, Unsur Pengarah, Umsur Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan renstra ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun kedepan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kondisi masa depan Kabupaten Bone, juga untuk memahami arah kebijakan dan tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bone.
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi dasar penyusunan visi , misi , kebijakan , strategi dan program serta kegiatan penanggulangan bencana daerah pada pelaksanaan tahapan pembangunan jangka menengah 2018-2023.
- c. Mensinergikan program-program strategis pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana.
- d. Sebagai Pedoman dalam menyusun serangkaian tindakan pilihan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone.
- e. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah terkait dan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018-2023 secara sistematis terdiri dari delapan (8) bab, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang diuraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum,

defenisi Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Pada bab ini dikemukakan tentang tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah, sumberdaya Perangkat daerah, tantangan dan peluang pelayanan Perangkat daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, Pada bab ini dikemukakan secara ringkas tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan Telaahan Renstra K/L dan Renstra, dan Telaahan tentang RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Pada bab ini, tujuan jangka menengah Perangkat Daerah, dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, Pada bagian ini dikemukakan tentang pentingnya rencana strategis dan merupakan penutup dari dokumen rencana strategis dan harapan kepada semua pihak yang berkepentingan agar menjadikan renstra ini sebagai penunjuk arah dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan BPBD Kab. Bone pada periode 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam hubungan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana daerah yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah dengan rincian tugas sbb :

a. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bonemempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk dan arahan Bupati Bone.

b. Uraian Tugas Pokok :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi akibat bencana secara adil dan merata ;
2. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan, dan pengembangan informasi peta rawan bencana ;
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana ;
6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana ;
7. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
8. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas ; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

c. Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone adalah Unsur Pengarah dan Unsur pelaksana

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai Fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur pengarah

Unsur pengarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Memantau dan;
- c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi;
- b. Komando;
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- d. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada BPBD Kabupaten Bone. Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 28 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Badan, Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dengan rincian sbb :

1) . Kepala Badan

Mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional terhadap usaha Penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.

Kepala Badan Mempunyai Tugas :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan bencana dan Penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan Efisien
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan
- d. Meyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- e. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- f. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya.
- g. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- h. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- i. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2) Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana. Untuk melaksanakan tugas, unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah
- b. Memantau dan
- c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

3) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana saat tanggap darurat dan pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas, unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
- b. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

4) Sekretaris

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai Fungsi :

- a. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan BPBD
- b. Menyusun perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan Peraturan perundang – undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga BPBD
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub.bagian :

- a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub.Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Sub. Bagian Program

5) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- c. Pelaksanaan Hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Melakukan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- e. Melaksanakan Tugas – tugas lain yang diberikan pimpinan.

- ◆ Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 (Dua) seksi :
 - a. Seksi Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan

6). **Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. Penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - f. Melaksanakan tugas – Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 (Dua) Seksi :
- a. Seksi Tanggap Darurat
 - b. Seksi Perbaikan dan bantuan darurat.

7) **Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan umum di bidang Penanggulangan Bencana pada pascabencana.

- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana
- c. Penyusunan Perencanaan di bidang Penanggulangan Bencana Pascabencana.
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 2 (Dua) seksi:
 - a. Seksi Penilaian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Fisik
 - b. Seksi Pemulihan, Peningkatan Sosial Ekonomi dan Penanganan Pengungsi.

e. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, maka stuktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone, terdiri dari 1(satu) Kepala Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIa (secara ex-officio), 1(satu) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIb, 1(satu) Sekretaris, 3(tiga) Kepala Bidang setingkat eselon IIIbdan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat eselon IVa.

Secara terperinci diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat
Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
 - Seksi Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik.
Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

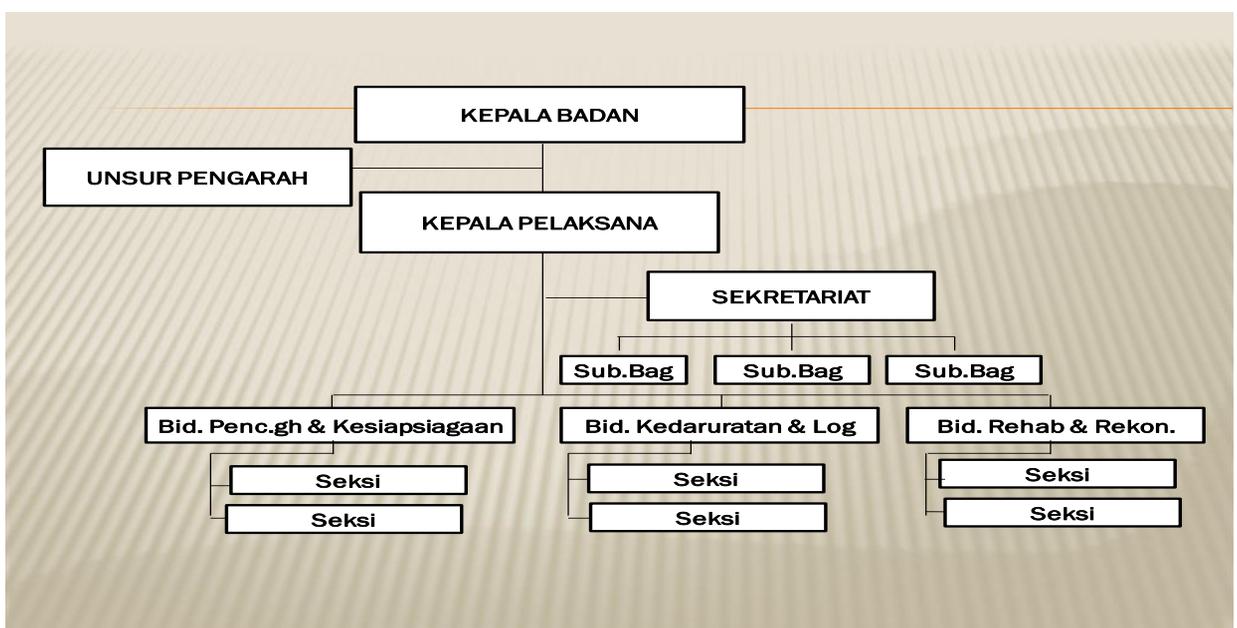
- Seksi Tanggap Darurat
 - Seksi Perbaikan dan Bantuan Darurat
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
- Seksi Penilaian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Fisik
 - Seksi Pemulihan, Peningkatan Sosial Ekonomi dan Penanganan Pengungsi

Berdasarkan pada Eselonisasi, maka Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, terdiri dari :

1. Kepala Badan (Eselon IIa) 1 orang
2. Kepala Pelaksana Badan (Eselon IIb) 1 orang.
3. Sekretaris (Eselon IIIb) 1 orang
4. Kepala Bidang (Eselon IIIb) 3 orang
5. Tim Pengarah (Non Eselon)
6. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon IVa) 9 (sembilan) orang.
7. Staf sebanyak sesuai kebutuhan.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1



Sumber :

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

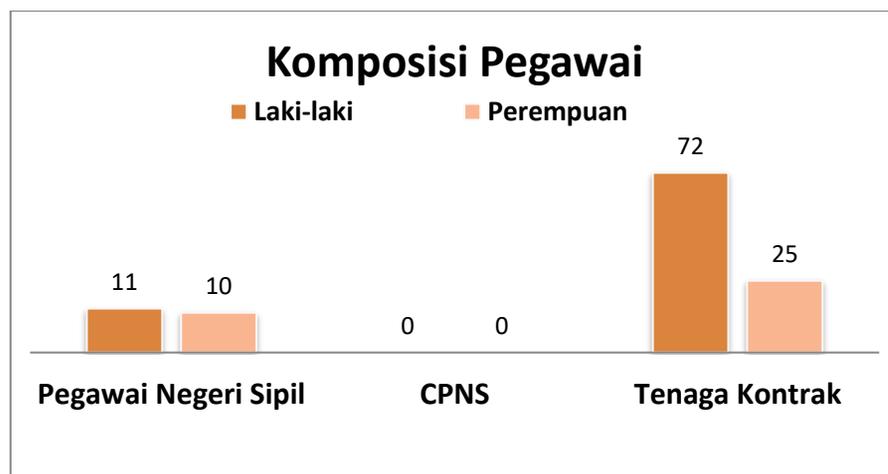
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Personalia)

BPBD Kabupaten Bone saat ini memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 84 orang pegawai, terdiri atas 21 orang PNS dan 97 orang tenaga kontrak. Ditinjau dari segi tingkat pendidikan, golongan, eselonering/ jabatan dan segi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan, kondisi Sumber Daya Manusia BPBD disajikan pada Tabel berikut ini :

2.2.1. Komposisi Pegawai

No	Klasifikasi Pegawai	Jumlah		Persentase %	
		L	P	L	P
1	Pegawai Negeri Sipil	11	10	53	47
2	CPNS	-	-	-	-
3	Tenaga Kontrak	72	25	74	25

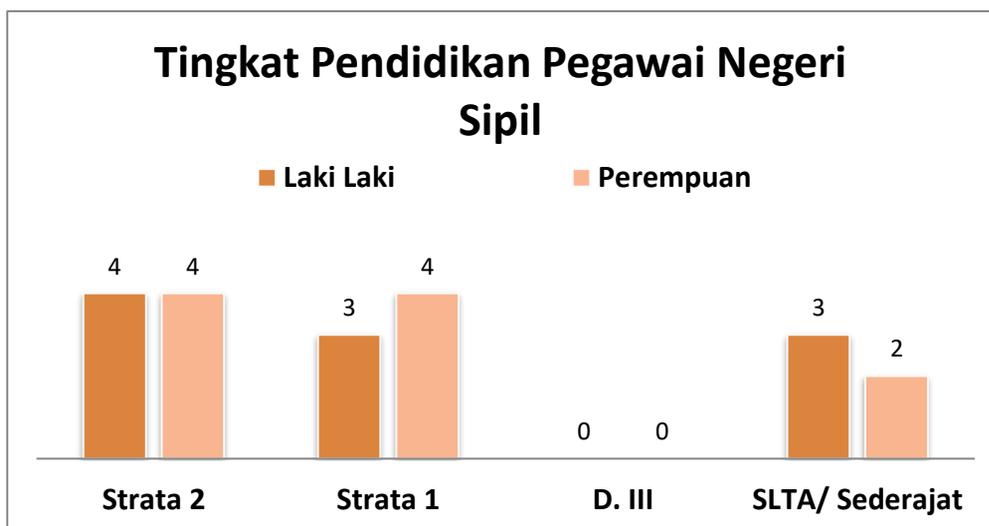
Gambar 2



2.2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Persentase (%)	
		L	P	L	P
1	Strata 2	4	4	19	19
2	Strata 1	3	4	14	19
3	D. III	1	-	5	-
4	SLTA/ Sederajat	3	2	14	10

Gambar 3



2.2.3 Tingkat Golongan

No	Golongan	Jumlah		Persentase (%)	
		L	P	L	P
1	Golongan IV	5	1	24	5
2	Golongan III	3	7	14	33
3	Golongan II	3	2	14	10
4	Golongan I	-	-	-	-

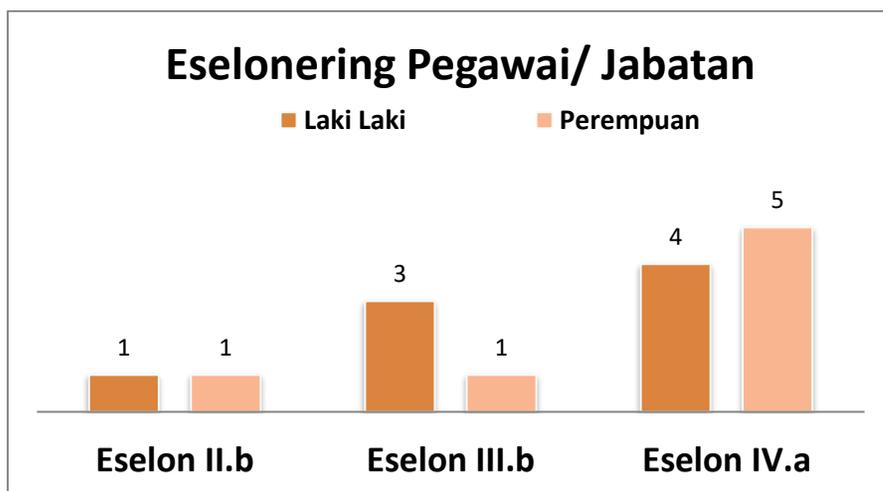
Gambar 4



2.2.4 Eselonering Pegawai/ Jabatan

No	Eselon	Jumlah		Keterangan	
		L	P	L	P
1	Eselon II.b	1	-	5	-
2	Eselon III.b	3	1	14	5
3	Eselon IV.a	4	5	19	24

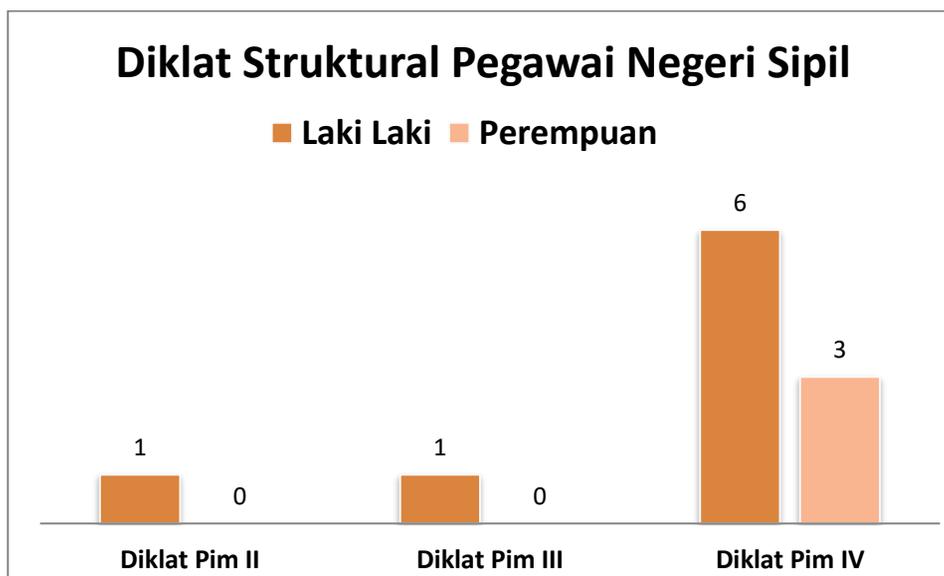
Gambar 5



2.2.5 Diklat Struktural Pegawai Negeri Sipil

No	Diklat Formal	Jumlah		Persentase (%)	
		L	P	L	P
1	Diklat Pim II	1	-	5	-
2	Diklat Pim III	1	-	5	-
3	Diklat Pim IV	6	3	28	

Gambar 6



Asset

Sarana dan Prasarana yang tersedia pada BPBD Kabupaten Bone, digambarkan sebagai berikut :

2.2.6 Asset peralihan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Bone

NO	NAMA JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG	KETERANGAN
1	Perahu Karet	1 Unit	Rusak berat	Gudang
2	Life Jacket	6 Unit	Rusak berat	Gudang
3	Tenda Keluarga	1 Unit	Rusak berat	Gudang
4	Senter Dapur Umum	2 Unit	Rusak berat	Gudang
5	Rimbui	1 Unit	Rusak berat	Gudang
6	Mic Sandang	1 Unit	Rusak berat	Gudang

7	Derek (troler)	1 Unit	Rusak berat	Gudang
8	Peta Rupa Bumi	1 Buah	Rusak berat	Gudang
9	Tenda Platon	1 Buah	Rusak berat	Gudang
10	Fiber	1 Unit	Rusak berat	Gudang
11	Meja Rapat	1 Buah	Rusak berat	Gudang
12	Kompur Dapur Umum	1 Set	Rusak berat	Gudang
13	Meja Kantor	1 Buah	Rusak berat	Gudang
14	Kursi	4 Buah	Rusak berat	Gudang
15	Mesin Perahu Karet	2 Buah	Baik	Gudang
16	Panci	1 Set	Baik	Gudang
17	Ranet	1 Unit	Baik	Kantor BPBD

2.2.7 Asset yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone :

NO	NAMA JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG	PEMEGANG SEMENTARA
1	Mobil Innova	1 Unit	Baik	H.BAHAR KADIR,SH,MH
2	Komputer PC	2 Unit	Baik	Kantor BPBD
3	Printer			
	- Epson LQ	4 Unit	Baik	Kantor BPBD
	- HP LaserJet	1 Unit	Baik	Kantor BPBD
4	Meja Kerja Pimpinan	1 Unit	Baik	Kantor BPBD

5	AC	7 Unit	Baik	Kantor BPBD
6	Televisi	1 Unit	Rusak	Kantor BPBD
7	Kursi Putar	5 Buah	Baik	Kantor BPBD
8	Kursi Futura	50 Buah	Baik	Kantor BPBD
9	Noote Book / Ipad	10 Unit	Baik	1. H.Darmadi Syafuruddin,SH.MSi 2. Susi susanti,S.Sos 3. Op.Siakuda 4. Sitti Faliha 5. Nurdiana,S.Sos , M.Si 6. Drs.Anwar Sahude 7. Hj.Sitti Rahmah,SE.MSi 8. Hj.Sakina , SE.M.Si 9. Sumarlinas,S.Sos 10. Evi Febrianti
10	Faximile	1 Buah	Baik	Kantor BPBD
11	Mesin Ketik	1 Unit	Baik	Kantor BPBD
12	Laptop/ Notebook	1 Unit	Baik	Haryuni,S.Sos
13.	Tablet Samsung S.3	1 Buah	Rusak	H. BAHAR KADIR,SH.MH
14.	Handy Talkie (HT)	8 Unit	Baik	Kantor BPBD
15	Kamera SONY	1 Buah	Baik	M. ILHAM, S.Sos
16	Handycam SONY	1 Buah	Rusak	H. BAHAR KADIR, SH, MH

2.2.8 Asset yang bersumber dari Bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Prop. Sul Sel :

NO	NAMA JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG	PEMEGANG SEMENTARA
1	2	3	4	5
1	Genset 5 KVA	1 Unit	Baik	Kantor BPBD
2	Radio Rig Lengkap	1 Set	Baik	Kantor BPBD
3	Tenda Posko	1 Unit	Baik	Gudang
4	Tenda Regu	3 Unit	Baik	Gudang
5	Tenda Peleton	2 Unit	Baik	Gudang
6	Tenda Keluarga	5 Unit	Baik	Gudang
7	Tenda Pengungsi	4 Unit	Baik	Gudang
8	Velbed	5 Buah	Rusak	Gudang
9	Water Treatment Portable	1 Buah	Baik	Gudang
10	Motor Triller	2 Unit	Baik	Hj.Darmadi .S.,SH.M.Si,M.Ilham,S.Sos
11	Mobil Barang / Rescue	1 Unit	Baik	H.BAHAR KADIR,SH,MH
12	Light Tower Portable	1 Unit	Baik	Gudang
13	Perahu Lipat Kecil	2 Unit	Baik	Gudang
14	Mesin Pompa Karhutla	2 Unit	Baik	Gudang

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

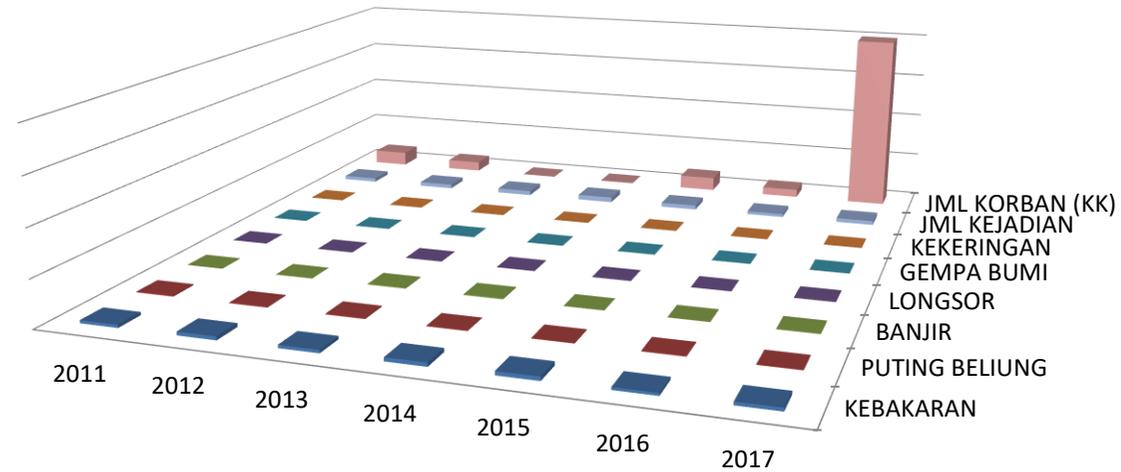
Setelah terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone pada bulan Oktober tahun 2010 dan mulai melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2011, maka dalam kurun waktu 2011 dan 2012 telah melakukan pendataan kejadian bencana, jenis kejadian bencana, jumlah korban (Kepala Keluarga) yang sebelumnya data kejadian bencana dan penanganan korban bencana belum ada lembaga/ Perangkat Daerah yang menangani khusus. Data mengenai Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 yang paling tinggi kejadian bencananya, begitu pula dengan pemetaan daerah rawan bencana yang ada di Kabupaten Bone , saat ini semua data tersebut telah tersedia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. Data mengenai kejadian bencana di Kabupaten Bone dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Data Kejadian Bencana

2.3.1 Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2011-2017

N O	TAHU N	KEBAKA RAN	PUTIN G BELIU NG	BANJI R	LONGS OR	GEM PA BUMI	KEKERIN GAN	JML KEJA DIAN	JML KORB AN (KK)
1	2011	64	21	-	-	-	-	85	320
2	2012	77	14	1	-	-	-	92	221
3	2013	65	18	17	1	-	-	101	6,134
4	2014	80	8	18	8	1	-	115	6,170
5	2015	82	13	-	1	-	1	97	307
6	2016	54	10	3	2	1	-	70	179
7	2017	68	11	8	1	-	-	88	3.981
8	2018	90	22	18	9	-	-	139	6.885
JUMLAH		580	117	65	22	2	1	787	17.312

Gambar 2 : Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2011-2017



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■ KEBAKARAN	64	77	65	80	82	54	68
■ PUTING BELIUNG	21	14	18	8	13	10	11
■ BANJIR	0	1	17	18	0	3	8
■ LONGSOR	0	0	1	8	1	2	1
■ GEMPA BUMI	0	0	0	1	0	1	0
■ KEKERINGAN	0	0	0	0	1	0	0
■ JML KEJADIAN	85	92	101	115	97	70	88
■ JML KORBAN (KK)	320	221	6.134	6.17	307	179	3,981

Selanjutnya data mengenai kejadian bencana per Kecamatan Tahun 2011 dan Tahun 2017 pada tabel berikut ini

Tabel 2.3.2

❖ Data Kejadian Bencana per Kecamatan Tahun 2011

NO	KECAMATAN	KEBAKARAN	PT.BELIUNG	BANJIR	LONGSOR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	T.R. BARAT	16	-	-	-	16
2	T.RIATTANG	10	1	-	-	11
3	DUA BOCCOE	1	8	-	-	9
4	LAMURU	3	3	-	-	6
5	T.R. TIMUR	4	1	-	-	5
6	PALAKA	3	2	-	-	5
7	CENRANA	3	2	-	-	5
8	TL.SIATTINGE	4	-	-	-	4
9	BONTO CANI	2	2	-	-	4
10	CINA	4	-	-	-	4
11	AWANGPONE	1	2	-	-	3
12	BAREBBO	1	2	-	-	3
13	SIBULUE	-	3	-	-	3
14	TELLU LIMPOE	1	2	-	-	3
15	AJANGALE	2	-	-	-	2

16	ULAWENG	1	1	-	-	2
17	LAPRI	-	2	-	-	2
18	LIBURENG	2	-	-	-	2
19	SALOMEKKO	2	-	-	-	2
20	TONRA	1	-	-	-	1
21	KAJUARA	1	-	-	-	1
22	PATIMPENG	1	-	-	-	1
23	BENGO	1	-	-	-	1
JUMLAH		64	31	0	-	95

2.3.3 Data Kejadian Bencana per Kecamatan Tahun 2012

NO	KECAMATAN	KEBAKARAN	PT.BELIUNG	BANJIR	LONGSOR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	T.R. TIMUR	14	2	-	-	16
2	T.R. BARAT	12	-	-	-	12
3	T.RIATTANG	9	1	-	-	10
4	CINA	6	-	-	-	6
5	DUA BOCCOE	3	2	-	-	5
6	AWANGPONE	3	1	-	-	4
7	BAREBBO	3	1	-	-	4
8	SIBULUE	1	3	-	-	4
9		3	1	-	-	4

	TL.SIATTINGE					
	TELLU					
10	LIMPOE	2	-	1	-	3
11	LIBURENG	3	-	-	-	3
12	MARE	2	1	-	-	3
13	PONRE	3	-	-	-	3
14	KAJUARA	3	-	-	-	3
15	AMALI	3	-	-	-	3
16	AJANGALE	-	2	-	-	2
17	BENGO	2	-	-	-	2
18	LAPRI	2	-	-	-	2
19	SALOMEKKO	2	-	-	-	2
20	BONTO CANI	1	-	-	-	1
JUMLAH		77	14	1	-	92

2.3.4 Data Kejadian Bencana per Kecamatan Tahun 2013

NO	KECAMATAN	KEBAKARAN	PT.BELIUNG	BANJIR	LONGSOR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	DUA BOCCOE	2	5	3	-	10
2	MARE	3	1	1	-	5
3	T.RIATTANG	8	2	1	-	11
4	AJANGALE	1	2	2	-	5

5	CINA	9	0	1	-	10
6	T. R. BARAT	8	0	1	-	9
7	SIBULUE	4	1	1	-	6
8	TL. SIATTINGE	3	-	1	-	4
9	CENRANA	-	-	2	-	2
10	T. R TIMUR	-	1	1	-	2
11	BAREBBO	4	1	-	-	5
12	BONTOCANI	2	2	-	-	4
13	ULAWENG	4	-	-	-	4
14	AMALI	2	-	1	-	3
15	AWANGPONE	3	-	-	-	3
16	BENGO	3	-	-	-	3
17	PONRE	2	-	-	1	3
18	TELLU LIMPOE	-	2	-	1	3
19	KAJUARA	1	1	-	-	2
20	LAPRI	2	-	-	-	2
22	LIBURENG	1	-	1	-	2
23	PALAKKA	2	-	-	-	2
24	TONRA	-	-	1	-	1
25	LAMURU	1	-	-	-	1
JUMLAH		65	18	17	2	102

2.3.5 Data Kejadian Bencana per Kecamatan Tahun 2014

NO	KECAMATAN	KEBAKARAN	PT.BELIUNG	BANJIR	LONGSOR	GEMPA BUMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SIBULUE	2	-	3	-	-	5
2	LIBURENG	4	-	1	1	-	6
3	T.R. TIMUR	9	1	1	-	-	11
4	DUA BOCCOE	3	1	1	1	-	6
5	CINA	5	1	2	-	-	8
6	AWANGPONE	4	-	3	-	-	7
7	T. RIATTANG	5	-	2	-	-	7
8	BAREBBO	7	-	1	-	-	8
9	T.R BARAT	7	-	1	-	-	8
10	PONRE	4	1	-	3	-	8
11	AJANGALE	1	-	1	-	-	2
12	TL. SIATTINGE	5	-	-	-	-	5
13	TONRA	-	-	1	-	-	1
14	CENRANA	4	-	-	-	-	4
15	LAPRI	3	-	-	1	-	4
16	SALOMEKKO	1	-	1	-	-	2
17	ULAWENG	3	-	-	-	-	3
18	BENGO	4	-	-	-	1	5

19	KAJUARA	1	-	1	-	-	2
20	PALAKKA	3	-	-	-	-	3
22	MARE	2	1	-	-	-	3
23	TL. LIMPOE	-	2	-	-	-	2
24	BONTOCANI	1	1	-	-	-	2
25	AMALI	1	-	-	-	-	1
26	LAMURU	1	-	-	-	-	1
27	KAHU	-	-	-	-	-	-
28	PATIMPENG	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		80	8	18	8	1	115

2.3.6 Data Kejadian Bencana per Kecamatan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	KEBAKARAN	PT.BELIUNG	BANJIR	LONGSOR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	AJANGALE	1	6	-	-	7
2	TL. LIMPOE	1	-	-	1	2
3	LAPRI	3	-	-	-	3
4	PALAKKA	9	1	-	-	10
5	LAMURU	5	-	-	-	5
6	BAREBBO	6	-	-	-	6
7	ULAWENG	2	-	-	-	2
8	KAJUARA	2	4	-	-	6

9	T.R BARAT	8	-	-	-	8
10	T. RIATTANG	5	2	-	-	7
11	T. R TIMUR	6	1	-	-	7
12	CENRANA	4	2	-	-	6
13	BENGO	4	1	-	-	5
14	SIBULUE	5	-	-	-	5
15	PONRE	3	-	-	-	3
16	CINA	7	1	-	-	8
17	LIBURENG	2	4	-	-	6
18	AWANGPONE	1	1	-	-	2
19	BONTOCANI	2	-	-	-	2
20	PATIMPENG	2	-	-	-	2
21	AMALI	1	-	-	-	1
22	KAHU	1	-	-	-	1
23	DUA BOCCOE	1	-	-	-	1
24	TONRA	1	-	-	-	1
JUMLAH		82	23	-	1	106

2.3.7 Data Kejadian Bencana per Kecamatan Tahun 2016

NO	KECAMATAN	KEBAKARAN	PT.BELIUNG	BANJIR	LONGSOR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	AJANGALE	5	-	-	1	6

2	TL. LIMPOE	-	-	-	-	-
3	LAPRI	3	-	1	-	4
4	PALAKKA	1	-	-	-	1
5	LAMURU	2	-	1	-	3
6	BAREBBO	2	2	-	-	4
7	ULAWENG	2	-	1	-	3
8	KAJUARA	-	-	-	-	-
9	T.R BARAT	6	1	-	-	7
10	T. RIATTANG	12	5	-	-	17
11	T. R TIMUR	5	1	-	-	6
12	CENRANA	-	2	-	-	2
13	BENGO	4	1	-	-	5
14	SIBULUE	-	-	-	-	-
15	PONRE	-	-	-	-	-
16	CINA	2	-	-	-	2
17	LIBURENG	3	1	-	-	4
18	AWANGPONE	4	-	-	-	4
19	BONTOCANI	-	-	-	-	-
20	PATIMPENG	1	-	-	-	1
21	AMALI	-	-	-	-	-
22	KAHU	1	-	-	-	1
23	DUA BOCCOE	1	-	-	1	2
24	TONRA	-	1	-	-	1

	JUMLAH	54	14	3	2	73

2.3.8 Data Kejadian Bencana per Kecamatan Tahun 2017

NO	KECAMATAN	KEBAKARAN	PT.BELIUNG	BANJIR	LONGSOR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	AJANGALE	2	-	-	-	2
2	TL. LIMPOE	2	1	-	1	4
3	LAPRI	5	-	-	-	5
4	PALAKKA	4	2	-	-	6
5	LAMURU	2	-	-	-	2
6	BAREBBO	6	-	-	-	6
7	ULAWENG	1	1	-	-	2
8	KAJUARA	-	1	1	-	2
9	T.R BARAT	5	-	-	-	5
10	T. RIATTANG	8	2	1	-	11
11	T. R TIMUR	5	1	-	-	6
12	CENRANA	-	1	1	-	2
13	BENGO	-	-	-	-	-
14	SIBULUE	2	1	1	-	4
15	PONRE	3	-	-	-	3
16	CINA	-	-	-	-	-
17	LIBURENG	1	1	-	-	2

18	AWANGPONE	5	1	1	-	7
19	BONTOCANI	2	-	-	-	2
20	PATIMPENG	1	-	-	-	1
21	AMALI	-	-	-	-	-
22	KAHU	2	-	-	-	2
23	DUA BOCCOE	2	-	1	-	3
24	TONRA	4	-	-	-	4
JUMLAH		68	11	8	1	88

Data mengenai Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Bone

❖ *RAWAN BANJIR*

- Kec. Ajangale
- Kec. Dua Boccoe
- Kec. Tellu Siattinge
- Kec. Cenrana
- Kec. Awangpone
- Kec. Barebbo
- Kec. Cina
- Kec. Mare
- Kec. Tonra
- Kec. Sibulue
- Kec. Kajuara
- Kec. Tanete Riattang
- Kec. Tanete Riattang Barat
- Kec. Tanete Riattang Timur

❖ *RAWAN ANGIN PUTING BELIUNG*

- Kec. Dua Boccoe
- Kec. Tellu Siattinge
- Kec. Cenrana

- Kec. Awangpone
- Kec. Cina
- Kec. Barebbo
- Kec. Sibulue
- Kec. Mare
- Kec. Salomekko
- Kec. Kajuara
- Kec. Kahu
- Kec. Libureng
- Kec. Bontocani
- Kec. Amali
- Kec. Lappariaja
- Kec. Lamuru
- Kec. Tellu Limpoe
- Kec. Palakka
- Kec. Tanete Riattang
- Kec. Tanete Riattang Barat

❖ *RAWAN TANAH LONGSOR*

- Kec. Tellu Limpoe
- Kec. Bontocani
- Kec. Libureng
- Kec. Lamuru
- Kec. Patimpeng
- Kec. Ponre
- Kec. Amali
- Kec. Bengo
- Kec. Lamuru
- Kec. Lappariaja
- Kec. Ajangale
- Kec. Kajuara
- Kec. Cenrana
- Kec. Dua Boccoe
- Kec. Salomekko

❖ *RAWAN KEBAKARAN*

- Kec. Tanete Riattang
- Kec. Tanete Riattang Barat
- Kec. Tanete Riattang Timur
- Kec. Tellu Siattinge
- Kec. Cina
- Kec. Bontocani
- Kec. Libureng

Tabel Pencapaian Kinerja BPBD Terlampir

Tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan dan Tabel Pendanaan Pelayanan OPD Terlampir...

Tabel 2.3.9
Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bone

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Kecamatan Lokasi Peninjauan dan Penanganan Korban Bencana (Kec.)				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Kebutuhan Dasar yang Tersalur terhadap Korban Bencana (Jenis)				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Penyiapan Hunian Sementara Terhadap Korban Bencana (Tenda)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penyiapan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana (Paket)				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%

	Jumlah Lokasi yang Diidentifikasi dan Diverifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (Kec.)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana (Laporan)				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi yang tersusun (Dokumen)				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
	Jumlah Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang Terdampak Bencana (paket)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Media yang digunakan dalam Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Bencana				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
3	Jumlah Lokasi Daerah Rawan Bencana yang Dipantau (Kec.)				-	100%	100%	100%	3 Media	-	100%	100%	100%	3 Media	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah TRC yang Melakukan Posko siaga Bencana (orang)				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	27 Kec.	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	27 Kec.	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Kegiatan PRB yang dilaksanakan (Kegiatan)				100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%
Jumlah Sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi Penanggulangan Bencana (Sekolah)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Workshop/Pameran Pengurangan Risiko Bencana yang diikuti (kegiatan)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kecamatan Lokasi Peninjauan dan Penanganan Korban Bencana (Kec.)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.3.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bone

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	194,099,500	263,197,500	490,206,500	556,430,000	729,915,500	194,099,500	255,836,425	476,685,557	553,818,437	726,468,219	100%	94%	95%	99%	99%		
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,000,000	33,697,500	52,550,000	32,903,600	34,000,000	5,000,000	26,541,425	41,224,717	31,560,783	32,618,919	100%	78.76%	78.44%	95.91%	95.93%		
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	46,890,000	63,000,000	97,920,000	123,390,000	135,280,000	46,890,000	63,000,000	95,820,000	122,130,000	133,230,000	100%	100%	97.85%	98.97%	98.48%		
3 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	6,500,000	12,890,000	15,050,000	24,800,000	3,000,000	6,295,000	12,870,000	15,050,000	24,795,000	100%	96.84%	99.84%	100%	99.97%		
4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	109,500,000	160,000,000	233,400,000	284,515,000	375,000,000	109,500,000	160,000,000	233,399,840	284,506,354	375,000,000	100%	100%	99.99%	99.99%	100%		
5 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	29,709,500	-	93,446,500	100,571,400	160,835,500	29,709,500	-	93,371,000	100,571,300	160,824,300	100%	-	99.91%	99.99%	99.99%		

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	82.500.000	360.258.600	557.437.800	431.590.000	184.252.500	82.500.000	357.796.600	553.414.500	431.590.000	168.657.550	100%	99%	99%	100%	98%		
1 Pembangunan Gedung Kantor	-	-	360.000.000	235.900.000	-	-	-	360.000.000	235.900.000	-	-	-	100%	100%	-		
2 Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional	-	33.000.000	-	16.465.000	-	-	33.000.000	-	16.465.000	-	-	100%	-	100%	-		
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	46.750.000	89.143.600	83.700.000	-	33.535.000	46.750.000	89.143.600	83.700.000	-	33.535.000	100%	100%	100%	100%	100%		
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	51.040.000	20.000.000	33.000.000	36.530.000	-	51.040.000	20.000.000	33.000.000	36.530.000	-	100%	100%	100%	100%		
5 Pengadaan Mebeleur	-	111.250.000	-	5.000.000	-	-	111.250.000	-	5.000.000	-	-	100%	-	100%	-		
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	-	5.750.000	21.325.300	71.000.000	13.897.500	-	5.750.000	21.101.300	71.000.000	3.897.500	-	100%	98,94%	100%	100%		
7 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	35.750.000	53.000.000	60.487.500	63.000.000	88.000.000	35.750.000	50.538.000	56.708.400	63.000.000	82.610.750	100%	95,35%	93,75%	100%	93,87%		
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	-	17.075.000	11.925.000	7.225.000	12.290.000	-	17.075.000	11.904.800	7.225.000	12.084.300	-	100%	99,83%	100%	98,32%		
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	-	1.680.000	5.000.000	735.000	3.900.000	-	1.680.000	1.260.000	735.000	3.900.000	-	100%	25%	100%	100%		
Bimbingan Teknis																	
1 Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	1.680.000	5.000.000	735.000	3.900.000	-	1.680.000	1.260.000	735.000	3.900.000	-	100%	25,20%	100%	100%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	44.600.000	57.220.000	51.070.000	-	-	44.424.200	57.219.700	51.069.900	-	-	99,61%	99,99%	100,00%		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
1	-	-	22.350.000	31.000.000	32.270.000	-	-	22.174.200	30.999.800	32.269.900	-	-	99,21%	99,99%	99,99%		
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	-	22.250.000	-	18.800.000	-	-	22.250.000	-	18.800.000	-	-	100%	-	100%		
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	26.220.000	-	-	-	-	26.219.900	-	-	-	-	99,99%	-		
Program Penunjang Pemerintahan Umum	-	-	-	58.800.000	67.815.000	-	-	-	58.800.000	67.814.800	-	-	-	100%	100%		
1 Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	-	-	-	58.800.000	67.815.000	-	-	-	58.800.000	67.814.800	-	-	-	100%	99,99%		

Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	205.316.000	204.984.000	346.418.000	364.800.000	528.100.000	191.815.100	201.729.000	344.348.100	364.256.600	526.097.400	93%	98%	100%	100%	100%		
1 Peninjauan dan Penanganan Korban di Lokasi Bencana	205.316.000	204.984.000	212.900.000	228.600.000	276.200.000	191.815.100	201.729.000	212.830.100	228.072.600	274.199.800	93%	98,41%	99,96%	99,76%	99,27%		
2 Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana	-	-	-	-	97.000.000	-	-	-	-	97.000.000	-	-	-	-	100,00%		
3 Penyiapan Hunian Sementara Terhadap Korban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 Penyiapan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana	-	-	133.518.000	136.200.000	154.900.000	-	-	131.518.000	136.184.000	154.897.600	-	-	-	99,98%	99,99%		
5 Penyelenggaraan Pusdalops	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	64.384.000	780.325.000	199.425.250	515.075.000	352.650.000	64.384.000	757.656.250	199.324.150	176.946.300	352.649.700	100%	98%	100%	100%	100%		
1 Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana	-	80.325.000	73.250.000	104.020.000	140.700.000	-	80.310.000	73.245.000	104.004.000	140.699.800	-	99,98%	99,99%	99,98%	99,99%		
2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	35.186.500	35.380.000	-	-	-	35.186.400	35.374.800	-	-	-	99,99%	99,98%	-		
3 Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	64.384.000	-	-	-	81.950.000	64.384.000	-	-	-	81.949.900	100%	-	-	-	99,99%		
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	-	700.000.000	90.988.750	375.675.000	130.000.000	-	677.346.250	90.892.750	37.567.500	130.000.000	-	96,76%	99,89%	100%	100%		

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana	81.700.500	72.500.000	106.912.200	123.500.000	198.538.500	81.690.400	72.475.400	106.912.200	123.499.900	198.538.400	100%	100%	100%	100%	100%		
1 Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Bencana melalui Brosur, Lefleat, dan lain-lain	81.700.500	72.500.000	106.912.200	123.500.000	198.538.500	81.690.400	72.475.400	106.912.200	123.499.900	198.538.400	100%	99,96%	100%	99,99%	99,99%		
Program Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	-	-	188.785.000	99.850.000	129.000.000	-	-	188.785.000	99.849.800	128.980.000	-	-	100%	100%	100%		
1 Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana	-	-	65.035.000	-	-	-	-	65.035.000	-	-	-	-	100%	-	-		
2 Penyuluhan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	-	-	123.750.000	99.850.000	129.000.000	-	-	123.750.000	99.849.800	128.980.000	-	-	100%	99,99%	99,98%		

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	154.758.500	-	-	-	-	154.758.500	-	-	-	-	100%		
1 Pemantauan Daerah Rawan Bencana	-	-	-	-	90.100.000	-	-	-	-	90.100.000	-	-	-	-	100%		
2 Kegiatan Pemberdayaan Posko Siaga Bencana	-	-	-	-	40.300.000	-	-	-	-	40.300.000	-	-	-	-	100%		
3 Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Di Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 Workshop/Pameran Pengurangan Risiko Bencana	-	-	-	-	24.358.500	-	-	-	-	24.358.500	-	-	-	-	100%		
Program Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dalam Bidang Kebencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra bpbd Tahun 2018-2023, maka perlu dirumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang akan ditempuh. Penetapan kebijakan dan strategi dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal BPBD Kabupaten Bone.

Kondisi internal mencakup kekuatan(strength) dan kelemahan (weakness).Sedangkan kondisi eksternal mencakup peluang (opportunities) dan tantangan (threats).

Berdasarkan pada pengamatan terhadap faktor internal dan eksternal tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi keempat aspek positif dan negatif dari BPBD Kabupaten Bone, sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan Internal.
- 2 Kekuatan (strength).

Beberapa kekuatan (strength) yang dapat digunakan antara lain, sebagai berikut :

- 1) Sudah terbentuknya BPBD Kabupaten Bone sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah;
- 2) Peraturan Perundang-undangan tentang penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dan kelembagaan penanggulangan bencana daerah.
- 3) Adanya SOP tentang Kebencanaan
- 4) Sudah terbentuk Tim Reaksi Cepat (TRC)
- 5) Inovasi tentang Gerakan Masyarakat Siaga Bencana (GEMAR SIGAB), Gemar sigab adalah gerakan masyarakat siaga bencana,sasaran yang dituju gemar sigab adalah seluruh lapisan masyarakat dan berbagai usia dan status sosial.Kegiatan melibatkan pihak BPBD dan unsur masyarakat dimana BPBD berperan sebagai penggagas dan motivator,BPBD melakukan pembinaan dan pengembangan,pengawasan serta evaluasi inovasi ditingkat Kecamatan,Desa dan Kelurahan yang keluarannya adalah terbukti tim gemar sigab ditingkat Kecamatan,Desa dan Kelurahan ,yang mana latar belakang terbentuknya inovasi ini adalah ketika mengalami bencana masyarakat hanya bisa meratapi nasibnya lalu pasrah begitupun lalu pasrah kepada bantuan pemerintah dan orang lain

yang peduli,hal ini menyebabkan kerugian yang relatif banyak dan berjatuhnya korban akibat bencana alam,belum lagi karena keterbatasan,bantuan dari pihak pemerintah misalnya sulit tersalurkan,hal ini disebabkan sulitnya akses ke lokasi bencana atau lambatya informasi dari masyarakat ke pihak BPBD karena ketiadaan sikap siap siaga,masyarakat harus menanggung risiko besar dan bencana yang dialaminya.Jumlah masyarakat di Kab. Bone Tahun 2017 yaitu 392.137 terdiri dari Laki-laki : 358.889 Perempuan : 392.13 Jumlah Kecamatan di Kab. Bone terdiri dari 27 Kecamatan Jumlah masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi Laki-laki : 200 Perempuan : 100 Jumlah Desa dan Kecamatan yang telah mendapatkan sosialisasi 15 Desa

- 6) Inovasi tentang Desa Siaga Bencana Peduli Difable (Deng Siba), Dalam Upaya untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, Badan Penanggulangan Desa Rama Anak di 5 Kecamatan yakni Kec. Dua Boccoe , Kec. T.Riattang Barat , Kec. Cina , Kec. Awangpone dan Kec. Libureng di implementasikan melalui kegiatan rintisan desa ramah anak dengan pengembangan inovasi Dengsiba(Desa Siaga Bencana Peduli Difable). Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan advokasi untuk menciptakan suatu lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak . selama ini program dan kegiatan termasuk pembangunan , anak-anak hanya dijadikan objek dan tidak semua haknya terpenuhi , termasuk untuk berkumpul dan berpendapat itu belum ada ruang untuk anak kedepan, ingin dalam pembangunan dipikirkan juga untuk kenyamanan anak. Dengan memberlukan kegiatan rintisan desa ramah anak khususnya di BPBD ada upaya penanganan terhadap korban khususnya anak baik sebelum saat dan setelah bencana yang menimpa anak itu lebih mahal di bandingkan dengan upaya pencegahan. Pendekatan melalui system itulah yang akan dilakukan bersama dalam menciptakan suatu lingkungan yang terlindungi bagi anak dalam memenuhi hak-hak mereka . Jumlah anak penyandang disabilitas dalam keterlibatan penyelenggaraan penanggulangan bencana laki-laki dan perempuan Jumlah keseluruhan anak Laki-laki : 3.304 orang Perempuan : 3.078 orang
- 7) Inovasi tentang Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (SI PENA), Sekolah siaga bencana merupakan upaya membangun

kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif disekolah dan lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Tujuan dari sekolah siaga bencana yaitu membangun budaya siaga dan budaya aman sekolah dengan mengembangkan jenjang sesama para berkepentingan di bidang penanganan bencana, meningkatkan kapasitas institusi sekolah dan individu dalam mewujudkan tentang belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota komunitas sekolah serta komunitas di sekeliling sekolah, menyebarkan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan sekolah Jumlah anak sekolah yang sudah mendapatkan sosialisasi penanggulangan bencana di 30 sekolah tahun 2018 Laki-laki : 751 Perempuan : 749. Jumlah anak sekolah yang sudah mendapatkan sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah tahun 2019 di 8 Sekolah Kab. Bone yaitu 400 orang Laki-laki : 208 Perempuan : 192

- 8) Jejaring kerja dengan berbagai pihak (stakeholders).
- 9) Kepemimpinan yang konstruktif dan partisipatif.

3 Kelemahan (Weakness)

Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan antara lain, sebagai berikut :

- 1) Pendanaan yang tidak sebanding dengan beban pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Sarana dan prasarana kerja yang terbatas.
- 3) Tim TRC masih didominasi tenaga honor dengan jumlah yang terbatas
- 4) Pemetaan informasi daerah rawan bencana belum menggunakan teknologi satelit.
- 5) Baru terdapat 3 kecamatan yang memiliki peta rawan bencana dari 27 kecamatan yang ada di kabupaten
- 6) Belum adanya PROTAP dan SPM tentang Kebencanaan
- 7) Ketersediaan SDM Dibiidang Kebencanaan yang masih terbatas

2. Faktor lingkungan external.

4 Peluang (Opportunities)

Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan terbitnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;
- b. Peraturan Perundang-undangan tentang penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dan kelembagaan penanggulangan bencana daerah.
- c. Mengurangi ancaman bencana sudah menjadi komitmen pemerintah dan masyarakat;
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi daerah yang aman bencana.

5 Tantangan (Threats)

Seperti halnya pembangunan tantangan permasalahan utama dalam penanggulangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. kebijakan tentang kebencanaan belum terintegrasi sampai ke tingkat desa.
- b. Tingkat Kepedulian dan ketangguhan masyarakat yang masih kurang;
- c. Wilayah Potensi bencana yang cukup luas

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Belum memadainya sarana, prasarana dan sumber daya aparatur pendukung penanganan korban bencana.

Kinerja yang masih belum optimal. Pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait belum siap dalam menghadapi bencana sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa maupun kerugian material yang ditimbulkan oleh bencana. Kinerja yang belum optimal seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat, terutama dalam hal pengerahan tenaga pencarian dan penyelamatan serta dalam koordinasi pengumpulan dan penyaluran bantuan bagi para korban.

- b. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi kejadian bencana

Data tentang jumlah korban meninggal dan mereka yang luka-luka serta jumlah rumah yang hancur total, rusak berat dan rusak ringan kerap kali ada beberapa versi yang saling berbeda satu sama lain. Perbedaan data dalam hal jumlah korban terluka dan jenis luka yang dialami korban akan mempersulit alokasi tenaga medis dan perlengkapan medis, termasuk obat-obatan, yang dibutuhkan untuk upaya pemulihan kesehatan warga yang menjadi korban. Begitu pula dengan perbedaan data dalam hal rumah, fasilitas dan infrastruktur publik yang rusak akan menghambat penghitungan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya akan memperlambat pemulihan seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

- c. Belum optimalnya penanganan pasca benca

Meningkatnya tuntutan masyarakat pada pasca bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana membutuhkan anggaran yang cukup besar. Alokasi anggaran untuk penanganan pemulihan infrastruktur akibat bencana cenderung diarahkan ke PD lain.

Adapun permasalahan lainnya yakni belum adanya perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif. Setiap terjadi bencana, siapa berbuat apa belum jelas, masih sangat abu-abu. Semua ingin membantu, tetapi kadang kala tidak tahu apa yang dilakukan. Apalagi pada saat sebelum terjadi bencana, apa yang harus dilakukan kadang masih bingung. Pada beberapa kegiatan malah dilakukan oleh beberapa instansi, sehingga terjadi tumpang tindih produk yang berbeda satu dengan yang lain yang malah membingungkan pengguna (pemerintah daerah). Hal seperti ini perlu dibuat suatu rencana penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai pelaku penanggulangan bencana.

Permasalahan umum lainnya adalah besarnya kebutuhan anggaran untuk pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bahaya, banyak komunitas yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Banyak tim siaga bencana komunitas yang perlu dibentuk dan diberi sumber daya yang memadai. Selain itu, di pihak pemerintah daerah sendiri masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam hal kelembagaan penanggulangan bencana dan kelengkapannya, masih banyak aparat pemerintah yang perlu diberi pendidikan dan pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN KEWENANGAN PD
			INTERNAL	EKTERNAL	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan PD	Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, karena masih terbatasnya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana		Sumber Daya Aparatur, Anggaran, Kebijakan	Landasan Hukum	Minimnya alokasi anggaran dari APBD

Sumber Dana	Belum optimalnya anggaran untuk penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 8 huruf d	Belum dilaksanakan beberapa rencananya kegiatan disebabkan kurangnya anggaran	Penanganan bencana yang komprehensif memerlukan sumber dana yang memadai	Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi
Pengurangan Resiko Bencana	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama pengurangan resiko bencana	PP No. 21 Tahun 2008	Dibutuhkan kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama pengurangan resiko bencana secara efektif	Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan resiko bencana
Penanganan Darurat Bencana	Belum optimal	UU No. 24 Tahun 2007 & PP No. 21 Tahun 2008	Kurangnya personil BPBD untyk cepat dalam darurat bencana	Dibutuhkan penanganan darurat secara cepat dan akurat	Belum optimalnya TRC
Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Belum optimal	UU No. 24 Tahun 2007 & PP No. 21 Tahun 2008	Anggaran belum memadai	Meningkatnya tuntutan masyarakat pada pasca bencana	Belum optimalnya ketersediaan anggaran

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Berdasarkan Visi Bupati Bone 2018– 2023 yaitu “ **Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**. Dapat diuraikan bahwa **Mandiri** berarti Kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan, **Berdaya Saing** berarti terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional, sedangkan **Sejahtera** berarti meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari uraian visi diatas dijabarkan dalam **Misi Bupati Bone 2018 – 2023** sebagai berikut yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat;
3. Meningkatkan akses , pemerataan , dan kualitas pelayanan kesehatan , pendidikan , dan sosial dasar lainnya;
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan;
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik;

Berdasarkan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 diketahui urusan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sangat erat kaitanya dengan misi ke 1 dan ke 3 yaitu

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- Meningkatkan akses, Pemerataan, dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial Dasar lainnya

3.2. Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat	Mandiri/Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial dasar lainnya	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan	Mandiri
5.	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat	Sejahtera

3.2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

KDH terpilih				
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)				
Misi 3 : Meningkatkan Akses, Pemerataan, dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Dasar lainnya				
1.	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya dukungan sumberdaya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana - Penanganan bantuan terhadap korban bencana pada masa darurat bencana belum sesuai harapan baik soal kebutuhan maupun jumlah bantuan terutama kepada kelompok yang rentan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya regulasi daerah sebagai landasan hukum terkait penanggulangan bencana - Laporan Kejadian bencana dan data korban yang terkena dampak bencana masih belum sesuai harapan sehingga menyulitkan proses tanggap darurat khususnya pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban terdampak terutama bagi kelompok rentan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Pemerintah Pusat terhadap penanggulangan bencana cukup besar - Adanya bantuan peralatan dan logistik dari pemerintah pusat, sekalipun dalam jumlah yang terbatas
2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral, belum dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh	Belum adanya regulasi daerah sebagai landasan hukum terkait penanggulangan bencana	Adanya regulasi yang mengatur bahwa kebijakan penanggulangan bencana harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional
3	Program Peningkatan Kualitas dan	Belum terbangunnya partisipasi dan kemitraan publik serta	Kurangnya sosialisasi serta pemberian pemahaman tentang	Adanya regulasi yang mengatur bahwa pengurangan resiko

	Akses Informasi Penanggulangan Bencana	swasta dalam sistem penanggulangan bencana	peran serta publik/masyarakat dalam penyebarluasan informasi penanggulangan bencana	bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan masyarakat dan dunia usaha
4	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana membutuhkan anggaran yang cukup besar	Alokasi anggaran untuk penanganan pemulihan infrastruktur akibat bencana cenderung diarahkan ke PD lain	Regulasi tentang pemulihan daerah pasca bencana telah diatur dalam peraturan pemerintah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

a. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian/Lembaga

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

1. Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan penanggulangan Bencana;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Propinsi / Kabupaten

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan
Sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi kejadian bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya data dan informasi yang akurat • Kurangnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan korban harus cepat, tepat dan akurat • Ketersediaan barang bantuan • Gudang layak pakai khususnya barang logistik
	Belum memadainya Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Aparatur (SDA) Pendukung penanganan korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya jumlah personil yang ada di perangkat daerah • Belum memadainya peralatan dan perlengkapan bencana • Rendahnya kemampuan dan keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan jumlah personil yang maksimal • Penambahan peralatan dan perlengkapan bencana yang lengkap • Meningkatkan kemampuan dan keterampilan TRC

		TRC	
Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	Belum optimalnya penanganan pasca bencana	Alokasi anggaran untuk penanganan pemulihan infrastruktur akibat bencana cenderung diarahkan ke PD lain	Regulasi tentang pemulihan daerah pasca bencana telah diatur dalam peraturan pemerintah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

a. Implementasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana.

b. Implementasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Pembangunan suatu Wilayah dan atau Kebijakan, Rencana, dan atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLH adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang disuulkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan Pembangunan Berkelanjutan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bone dalam penyusunan RPJMD merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai upaya peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone sebagaimana amanat pasal 29 ayat 1 undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam proses

penyusunan KLHS RPJMD Kab.Bone keterlibatan aktif stakeholders baik institusi pemerintah, akademisi dan masyarakat telah dilaksanakan, oleh karena itu keberlanjutan pelibatan seluruh stakeholders dalam pengawasan implementasi kajian tersebut perlu tetap diperkuat agar target-target yang telah direncanakan dapat dicapai dengan hasil maksimal. Hal ini diperlukan juga untuk melihat sejauh mana target-target tersebut telah dicapai dan dapat merespon dinamika perubahan yang terjadi pada kondisi lingkungan sebagai akses dari pembangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Bone.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Bone yang menangani urusan Penanggulangan Bencana .Badan Penanggulangan Bencana memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan erat dengan indicator yang terdapat pada tujuan nomor 1, 11 dan 13.Dari tujuan tersebut terdapat 12 Indikator yang menjadi kewenangan Badan penanggulangan Bencana Daerah.Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah diantaranya :

- Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua Negara.
- Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistic risiko bencana disemua ini, sesuai dengan The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
- Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kajian kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, social, lingkungan, dan bencana.
- Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan focus melindungi orang miskin dan orang – orang dalam situasi rentan.

Tabel Keterkaitan Program dan Kegiatan BPBD dengan TPB

Tabel 3.4
KETERKAITAN PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD DENGAN TPB

No	Tujuan	Target	No. Indikator	Indikator	Target PEPRES 59/2017)	Target (PEPRES 59/2017)-ringkasan	Capaian	Target Capaian	Gap	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	0.2	0.2	0	Program : Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana; Kegiatan : 1) Peninjauan dan penanganan korban di lokasi bencana; 2) Penyaluran bantuan dasar terhadap korban bencana; 3) Penyiapan hunian sementara terhadap korban bencana; 4) Penyiapan kebutuhan dasar terhadap korban bencana	

2	Mengakhiri Kemiskinan dalam Srgala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iljklm dan guncangan ekonomi, sosia, lingkungan, dan bencana	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah	Meningkat menjadi 39 daerah	27	39	-12	Program : Peningkatan kualitas dan akses informasi penanggulangan bencana; Kegiatan : Penyebarluasan informasi penanggulangan bencana melalui brosur, lefleaf dll
3	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iljklm dan guncangan ekonomi, sosia, lingkungan, dan bencana	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4)	Menurun menjadi 118,6	1.89	1.89	0	Program : Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; Kegiatan : 1) Pemberdayaan posko siaga bencana; 2) Workshop/pameran pengurangan risiko bencana

4	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosia, lingkungan, dan bencana	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	7,262,730,000	7,262,730,000	-	Program : Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahapan pasca bencana; Kegiatan : 1) Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian akibat bencana; 2) Monitorin, evaluasi dan pelaporan; 3) Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
5	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosia, lingkungan, dan bencana	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	3	3	0	

6	Menjadikan Kota dan permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansional mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun					
7	Menjadikan Kota dan permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansional mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019	Menurun menjadi 30%	1.89	1.89	0	Program : Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; Kegiatan : Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	

8	Menjadikan Kota dan permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansional mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	ada	2	2	0	Program: Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; Kegiatan : Pemantauan daerah rawan bencana
9	Menjadikan Kota dan permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansional mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun				

10	Menjadikan Kota dan permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplemntasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Farmework for Distater Risk Reduction 2015-2030	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada						
----	--	---	---------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

11	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1.*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Menurunnya indeks risiko bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019	ada					
12	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2.*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun					

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BPBD dalam gugus tugas dan fungsinya bertugas sebagai koordinator/pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, meliputi :

- Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventif, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat didalam perencanaan. Penanggulangan bencana lebih pada upaya-upaya pengurangan resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.
- Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk dan koordinasi lintas sector dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak. Jadi tidak seutuhnya tanggungjawab pemerintah/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergi dan terkoordinasi.
- Perlunya system penanggulangan bencana yang handal.
- Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana berdampak besar dilintas sector dan semua bidang. Mengganggu kehidupan masyarakat, oleh sebab itu semua lembaga, pihak, elemen, yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana perlu meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana.
- Penanggulangan bencana hendaknya dijadikan sebuah dasar dalam pembangunan kabupaten bone. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Bone

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya kemampuan yang dimiliki, serta factor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan dari Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan penanggulangan Bencana

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran dari Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana
3. Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	BASELINE 2017	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	11%	26%	41%	56%	70%	85%	100%
			Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	74%	78%	82%	86%	90%	95%	100%
			Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	C	CC	B	B	BB	BB	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023, maka dirumuskan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

- Peningkatan pelaksanaan administrasi pelaksanaan pemerintah daerah;
- Meningkatkan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana;
- Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
- Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

5.2 Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka kebijakan penanggungan bencana dirumuskan sebagai berikut :

- Penataan kelembagaan, analisa jabatan, penatalaksanaan dan peningkatan pelayanan;
- Penyusunan Dokumen dan Penyebarluasan Informasi terkait Penanggulangan Bencana;
- Pemantauan dan Evaluasi Daerah Rawan Bencana Disertai Sosialisasi
- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- Identifikasi dan verifikasi serta monev kondisi kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- Penyusunan dokumen baku terkait rencana rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan peta rawan bencana.

Tabel T-C.26 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone sudah Relevan dan Konsisten terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	: Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera		
MISI I	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Kebencanaan	1 Peningkatan pelaksanaan administrasi pelaksanaan pemerintah daerah	1 Penataan kelembagaan, analisa jabatan, penatalaksanaan dan peningkatan pelayanan
MISI III	: Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan penanggulangan Bencana	1 Meningkatkan Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana 2 Meningkatkan penanganan pemulihan pasca bencana	1 Meningkatkan Kualitas dan Akses Informasi dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 2 Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 Penyusunan Dokumen dan Penyebarluasan Informasi terkait Penanggulangan Bencana 2 Pemantauan dan Evaluasi Daerah Rawan Bencana Disertai Sosialisasi 3 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 1 Identifikasi dan Verifikasi Serta Monev Kondisi Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana 2 Penyusunan Dokumen Baku Terkait Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berdasarkan Peta Rawan Bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone yang akan diselenggarakan yaitu :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 5 kegiatan :**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - d. Rapat – rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
 - e. Pelaksanaan Adminstrasi Perkantoran
- 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 10 Kegiatan :**
 - a. Pembangunan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
 - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - e. Pengadaan Mebeleur
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
 - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- 3. Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - a. Pengadaan Pakaian Khusus Atau Hari-Hari Tertentu
- 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
- 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan terdiri dari 3 Kegiatan :**
 - a. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 6. Penunjang Pemerintahan Umum**
 - a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

- b. Pengelolaan Website Perangkat Daerah
 - c. Promosi dan Pameran Pembangunan
- 7. Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana terdiri dari 4 Kegiatan:**
- 1. Peninjauan dan Penanganan Korban di Lokasi Bencana
 - 2. Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana
 - 3. Penyiapan Hunian Sementara terhadap Korban
 - 4. Penyiapan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana
 - 5. Penyelenggaraan Pusdalops
- 8. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana terdiri dari 4 Kegiatan :**
- a. Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
 - c. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdampak Bencana
- 9. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana**
Penyebarluasan informasi penanggulangan bencana melalui brosur, leaflet, dan lain-lain.
- 10. Peningkatan Peran serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana terdiri dari 2 Kegiatan :**
- a. Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana
 - b. Penyuluhan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana
- 11. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana terdiri dari 5 Kegiatan :**
- 1. Pemantauan Daerah rantauan Rawan Bencana
 - 2. Pemberdayaan Posko Siaga Bencana
 - 3. Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana
 - 4. Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah
 - 5. Workshop/Pameran Pengurangan Resiko Bencana
- 12. Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dalam Bidang Kebencanaan

Adapun Penyajiannya dalam table sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			<i>Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP</i>	C	B		B		BB		BB		A		A			
		1 19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Realiasi Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	1,155,433,000	100	1,276,067,900	100	1,402,766,290	100	1,536,074,519	100	1,676,839,571	100	7,047,181,280	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
		1 19 01 02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air dan Listrik yang terbayar (Rekening)	24	24	60,000,000	24	66,000,000	24	72,600,000	24	79,800,000	24	87,846,000	120	366,246,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
		1 19 01 02	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	756	1,164	549,084,000	1,284	609,084,000	1,404	669,084,000	1,524	729,084,000	1,644	789,084,000	7,020	3,345,420,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
		1 19 01 15	3 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	96	96	22,800,000	120	25,080,000	120	27,588,000	120	30,346,800	120	33,381,480	576	139,196,280	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
		1 19 01 23	4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan yang Diikuti dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi (Kegiatan)	65	65	299,800,000	70	329,780,000	75	362,758,000	80	399,033,800	85	438,937,180	375	1,830,308,980	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
		1 19 01 24	5 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	48	48	223,749,000	48	246,123,900	48	270,736,290	48	297,809,919	48	327,590,911	240	1,366,010,020	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat

1	19	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100	184,470,000	100	443,317,000	100	490,648,700	100	542,213,570	100	598,434,927	100	2,259,084,197	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat		
1	19	02	03	1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang akan Dibangun (Unit)	-	-	-	1	119,900,000	1	131,890,000	1	145,079,000	1	159,586,900	4	556,455,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	02	05	2	Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional	Jumlah Pengadaan Dinas/Operasional (Unit)	1	-	-	1	19,800,000	1	21,780,000	2	23,958,000	2	26,353,800	6	91,891,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	02	07	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor (Paket)	1	2	33,800,000	4	75,000,000	4	82,500,000	4	90,750,000	4	99,825,000	18	381,875,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	02	09	4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)	3	2	22,700,000	5	75,000,000	5	82,500,000	5	90,750,000	5	99,825,000	22	370,775,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	02	10	5	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur (Paket)	-	2	16,500,000	4	20,000,000	4	25,000,000	4	30,000,000	4	35,000,000	18	126,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	02	22	6	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	2	2	14,730,000	2	16,203,000	2	17,823,300	3	19,605,630	3	21,566,193	12	89,928,123	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	02	24	7	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan Pembayaran pajak tahunan (STNK) secara rutin/berkala selama satu tahun anggaran (Paket)	8	8	84,000,000	9	92,400,000	10	101,640,000	12	111,804,000	14	122,984,400	53	512,828,400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	02	26	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Jenis)	-	0	-	5	5,500,000	6	6,050,000	8	6,655,000	8	7,320,500	27	25,525,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	02	28	9	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (Jenis)	3	4	12,740,000	4	14,014,000	6	15,415,400	6	16,956,940	6	18,652,634	26	77,778,974	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	02	29	10	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara (Jenis)	-	0	-	4	5,500,000	6	6,050,000	6	6,655,000	8	7,320,500	24	25,525,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat

1	19	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur (%)	-	-	-	100	130,000,000	100	140,000,000	100	150,000,000	100	160,000,000	100	580,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat	
1	19	03	05	1	Pengadaan Pakaian Khusus / Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (pasang)	-	0	-	130	130,000,000	140	140,000,000	150	150,000,000	160	160,000,000	580	580,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	05		Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur (%)	100	-	-	100	215,000,000	100	236,500,000	100	260,150,000	100	286,165,000	100	997,815,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat	
1	19	05	03	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)	-	0	-	5	175,000,000	5	192,500,000	5	211,750,000	5	232,925,000	20	812,175,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	05	03	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek (orang)	-	0	-	5	40,000,000	5	44,000,000	5	48,400,000	5	53,240,000	20	185,640,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Realisasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100	27,000,000	100	35,500,000	100	39,050,000	100	42,955,000	100	47,322,500	100	191,827,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat	
1	19	06	01	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi yang tersusun (Laporan)	2	2	27,000,000	2	29,700,000	2	32,670,000	2	35,937,000	2	39,530,700	10	164,837,700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	06	02	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Tersusun (Laporan)	2	-	-	2	2,900,000	2	3,190,000	2	3,509,000	2	3,895,900	8	13,494,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	06	04	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	-	-	-	1	2,900,000	1	3,190,000	1	3,509,000	1	3,895,900	4	13,494,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat

		1	19	08			Program Penunjang Pemerintahan Umum	Presentase Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100	100%	98,900,000	100%	208,790,000	100%	119,669,000	100%	131,635,900	100%	144,799,490	100%	1,080,459,390	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat	
		1	19	08	01	1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran yang telah disusun (Dokumen)	8	8	98,900,000	7	108,790,000	8	119,669,000	7	131,635,900	7	144,799,490	37	603,794,390	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat	
		1	19	08	02	2	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah pemeliharaan Website Aplikasi / Data Base yang Dikelola (Kegiatan)	1	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	5	175,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat	
		1	19	08	03	3	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran Pembangunan yang diikuti (kali)	-	-	-	1	65,000,000	1	71,500,000	1	78,650,000	1	86,515,000	4	301,665,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat	
Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana							<i>Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat</i>	<i>78%</i>	<i>82%</i>		<i>86%</i>		<i>90%</i>		<i>95%</i>		<i>100%</i>		<i>100%</i>				
								<i>Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		<i>100%</i>		<i>100%</i>		<i>100%</i>		<i>100%</i>		<i>100%</i>				
			1	19	23			Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Cakupan Ketersediaan Logistik Penanggulangan Bencana (%)	100	100	288,625,000	100	404,987,500	100	445,486,250	100	490,034,875	100	539,038,362	100	2,168,171,987	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
			1	19	23	01	1	Peninjauan dan Penangan Korban di Lokasi Bencana	Jumlah Peninjauan lokasi dan Penanganan Korban Bencana (Kali)	139	190	172,000,000	240	189,200,000	290	208,120,000	340	228,932,000	390	251,825,200	1,450	1,050,077,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kab. Bone
			1	19	23	03	2	Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana	Jumlah Kebutuhan Dasar yang Tersalur terhadap Korban Bencana (Jenis)	7	7	55,625,000	7	61,187,500	10	67,306,250	10	74,036,875	10	81,440,562	44	339,596,187	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27 Kec.
			1	19	23	04	3	Penyiapan Hunian Sementara Terhadap Korban	Jumlah Penyiapan Hunian Sementara Terhadap Korban Bencana (Tenda)	-	-	-	1	27,500,000	1	30,250,000	2	33,275,000	2	36,602,500	6	127,627,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
			1	19	23	05	4	Penyiapan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana	Jumlah Penyiapan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana (Paket)	2	2	61,000,000	2	67,100,000	4	73,810,000	4	81,191,000	6	89,310,100	18	372,411,100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
			1	19	23	06	5	Penyelenggaraan Pusdalops	Jumlah dokumen data dan informasi kebencanaan (Dokumen)	-	-	-	1	60,000,000	1	66,000,000	1	72,600,000	1	79,860,000	4	278,460,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat

					Presentase Kecamatan yang Memiliki Peta Rawan Bencana	26%	41%	56%	70%	85%	100%	100%								
1	19	26			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana	100	100	192,000,000	100	211,200,000	100	232,320,000	100	255,552,000	100	281,107,200	100	1,172,179,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	26	01	1	Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Bencana melalui Brosur, Leflat, dan lain-lain	36	36	192,000,000	60	211,200,000	60	232,320,000	60	255,552,000	60	281,107,200	276	1,172,179,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	28			Program Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	100	-	-	100	52,700,000	100	57,970,000	100	63,767,000	100	70,143,700	100	244,580,700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	28	01	1	Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana	-	0	-	100	35,000,000	100	38,500,000	100	42,350,000	100	46,585,000	400	162,435,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	28	02	2	Penyuluhan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	100	0	-	100	17,700,000	100	19,470,000	100	21,417,000	100	23,558,700	400	82,145,700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	30			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	100	100	190,750,000	100	291,825,000	100	321,007,500	100	353,108,250	100	388,419,074	100	1,545,109,824	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	30	01	1	Pemantauan Daerah Rawan Bencana	3	0	-	81	72,000,000	81	79,200,000	81	87,120,000	81	95,832,000	324	334,152,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27 Kec.
1	19	30	02	2	Kegiatan Pemberdayaan Posko Siaga Bencana	8,760	8,760	87,000,000	8,760	95,700,000	8,760	105,270,000	8,760	115,797,000	14,600	127,376,700	49,640	531,143,700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	30	03	3	Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	1	1	25,250,000	1	27,775,000	1	30,552,500	1	33,607,750	1	36,968,524	5	154,153,774	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
1	19	30	04	4	Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Di Sekolah	30	30	78,500,000	30	86,350,000	30	94,985,000	30	104,483,500	30	114,931,850	150	479,250,350	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1074 Sekolah
1	19	30	05	5	Workshop/Pameran Pengurangan Risiko Bencana	-	-	-	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	4	46,410,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat

		1	19	31		Program Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Cakupan Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100	100	-	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	66,550,000	100	232,050,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
		1	19	31	01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dalam Bidang Kebencanaan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Kebencanaan (orang)	-	-	-	6	50,000,000	10	55,000,000	10	60,500,000	10	66,550,000	36	232,050,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana						<i>Presentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah Korban Pasca Bencana</i>	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		1	19	24		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	100	100	210,000,000	100	6,094,200,000	100	6,703,620,000	100	6,746,982,000	100	6,794,680,200	100	26,662,804,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
		1	19	24	02	1 Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana	Jumlah Lokasi yang Diidentifikasi dan Diverifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (Kali)	81	81	158,000,000	81	173,800,000	81	191,180,000	81	210,298,000	81	231,327,800	405	964,605,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
		1	19	24	03	2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana (Laporan)	1	1	52,000,000	1	57,200,000	1	62,920,000	1	69,212,000	1	76,133,200	5	317,465,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
		1	19	24	04	3 Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Dokumen Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi yang tersusun (Dokumen)	1	0	-	1	163,200,000	1	179,520,000	1	197,472,000	1	217,219,200	4	757,411,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	T.R Barat
		1	19	24	05	4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	Jumlah Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang Terdampak Bencana (paket)	1	1	113,322,000	6	5,700,000,000	6	6,270,000,000	6	6,270,000,000	6	6,270,000,000	25	24,623,322,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari rangkaian Perencanaan Pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas.

Adapun indikator kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone yaitu Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara Terpadu dan Menyeluruh dengan di dukung 6 Program yaitu Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana , Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana, Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana, Peningkatan Peran serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone sudah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, hal ini dapat disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	26%	41%	56%	70%	85%	100%	100%
2	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	78%	82%	86%	90%	95%	100%	100%

3	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan analisis isu-isu strategis, potensi dan peluang serta dinamika perubahan sosial dalam masyarakat di Kabupaten Bone.

RENSTRA BPBD Kabupaten Bonetahun 2018-2023 ini merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone, sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan RENSTRA ini sangat tergantung pada pemahaman dan kemampuan dalam mengembangkan sistem koordinasi dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone.

Keberhasilan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bone. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian Renstra Tahun 2018-2023, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana Strategik ini bersifat terbuka, dinamis dan selalu menampung berbagai masukan dan perbaikan dari berbagai instansi terkait, sehingga harapan terciptanya perlindungan ancaman bencana kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Watampone, Februari 2019



Pt. KEPALA BPBD KAB. BONE

H. A. SURYA DARMA, SE. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. 19600424 198702 1 004